



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG  
PENGELOLAAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR : PRJ-2/LPDP/2017

NOMOR : 12.1.38/UN32.IV/DN/2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mokhamad Mahdum, Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.01/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berkedudukan di Gedung Ali Wardhana Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1320/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi di bidang pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Universitas Negeri Malang dengan Nomor NK-21/LPDP/2014 dan Nomor 19210/UN32/DN/2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut **Beasiswa**) adalah beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan Program Magister dan Doktor.

- (2) Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Indonesia penerima **Beasiswa** yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan peserta didik **PIHAK KEDUA** pada Program Magister dan Doktor.
- (3) Surat Keterangan Sponsor (*Letter of Sponsorship*, selanjutnya disingkat LOS) adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan bahwa calon mahasiswa adalah penerima **Beasiswa** dan oleh karenanya biaya pendidikan dijamin oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya pendidikan secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran **Beasiswa** selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.

## PASAL 2 TUJUAN

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan administrasi, penyaluran, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan **Beasiswa**.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Administrasi perkuliahan Penerima Beasiswa
- (2) Penyaluran **Beasiswa** secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Monitoring dan evaluasi perkuliahan Penerima Beasiswa.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun sejak 1 September 2015 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. mengirimkan atau tidak mengirimkan Penerima Beasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa di **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan laporan capaian akademik Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk semester berikutnya; dan
  - d. menunda kewajiban pembayaran **Beasiswa** selama tagihan belum diterima atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan **Beasiswa** apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
  - c. menerbitkan LOS kepada Penerima Beasiswa untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pedoman **Beasiswa**;
  - d. melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi konsep RAB yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. menanggung biaya pendidikan sesuai komponen **Beasiswa** pada RAB bagi Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengirimkan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** sesuai jadwal pembayaran **Beasiswa** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani;
  - c. menerima pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK KESATU**; dan
  - d. menerima pemberitahuan pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa yang telah menyerahkan LOS dari **PIHAK KESATU**;
  - c. menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU** atas Penerima Beasiswa yang telah menyerahkan LOS, setelah periode daftar ulang untuk Program Magister dan Doktor selesai dilaksanakan;
  - d. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dan menyampaikan laporan capaian akademik setiap semester kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - e. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

Jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Program Magister maksimal selama **2 (dua)** tahun.
- (2) Program Doktor maksimal selama **4 (empat)** tahun.

## **PASAL 7 BIAYA PENDIDIKAN**

- (1) Komponen **Beasiswa** yang secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** mencakup biaya pendidikan yang klasifikasi dan jumlahnya mengacu pada Surat Keputusan Rektor.
- (2) Rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijelaskan di dalam RAB, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
  - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu.
  - c. Penerima Beasiswa dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang diakibatkan oleh perpanjangan jangka waktu pendidikan melebihi ketentuan pada Pasal 6 **Perjanjian** ini.
- (6) Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, RAB dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran biaya pendidikan berikutnya.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan **Beasiswa**.

- (3) **PIHAK KESATU** menerbitkan LOS kepada Penerima Beasiswa untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pedoman **Beasiswa**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan akses daftar ulang dan registrasi kepada Penerima Beasiswa yang telah menyerahkan LOS dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB atas Penerima Beasiswa yang telah menyerahkan LOS, setelah periode daftar ulang untuk Program Magister dan Doktor selesai dilaksanakan, ditujukan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) **Perjanjian** ini.
- (6) **PIHAK KESATU** melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi konsep RAB yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- (8) **PIHAK KEDUA** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pendidikan.
- (9) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) **Perjanjian** ini.
- (10) Jadwal pengiriman tagihan biaya pendidikan diatur sebagai berikut:
  - a. Khusus Semester 1 (satu) segera setelah RAB ditandatangani **PARA PIHAK**.
  - b. Semester Gasal pada bulan Juli
  - c. Semester Genap pada bulan Januari
- (11) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pendidikan berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya pendidikan.
- (12) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran **Beasiswa** selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pendidikan diterima.
- (13) Transfer pembayaran **Beasiswa** ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 

Nama Rekening	: BPG 032 UNIVERSITAS NEGERI MALANG 400074
Nomor Rekening	: 5530853-4
Nama Bank	: BNI Cabang Malang
Notifikasi Surel	: kerjasama@um.ac.id
- (14) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (13), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.
- (15) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan status perkuliahan Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah transfer pembayaran **Beasiswa** diterima.
- (16) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan pembayaran **Beasiswa** yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan.
- (17) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran **Beasiswa** yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (18) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dan menyampaikan laporan capaian akademik setiap semester kepada **PIHAK KESATU**.
- (19) **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
  - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu.
  - c. Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
  - d. Penerima Beasiswa melakukan tindakan penyimpangan (termasuk tidak aktif kuliah).
- (20) **PIHAK KESATU** tidak menyetujui adanya perpanjangan jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa yang disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**.
- (21) **PIHAK KESATU** menyampaikan tindak lanjut secara tertulis atas pemberitahuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (14) selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima.
- (22) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (23) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) **Perjanjian** ini ditujukan kepada:

**Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan**  
(c.q. **Direktur Dana Kegiatan Pendidikan**)  
Gedung Ali Wardhana Lantai 2  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1  
Jakarta Pusat 10710

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Gedung Ali Wardhana Lantai 2, Kementerian Keuangan  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat 10710  
Telepon : (021) 3846474  
Faksimile : (021) 3808392  
Surel : [lpdp.partnership@kemenkeu.go.id](mailto:lpdp.partnership@kemenkeu.go.id) untuk urusan kerjasama (umum)  
[lpdp.invoice@kemenkeu.go.id](mailto:lpdp.invoice@kemenkeu.go.id) untuk urusan beasiswa (teknis)  
[cs0.lpdp@kemenkeu.go.id](mailto:cs0.lpdp@kemenkeu.go.id) untuk urusan lainnya.

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : 0341) 551921  
Surel : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

**PASAL 10**  
**(1) FORCE MAJEURE**

- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (5) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional.

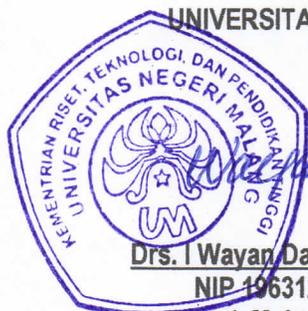
**PASAL 12  
PERUBAHAN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



*Mokhammad*  
**Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.**

**NIP 19631231 198812 1 002**

**Malang, 12/1/2017**

**PIHAK KESATU  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**



*Mokhammad*  
**Mokhammad Mahdum**

**NIP 19731129 199403 1 003**

**Jakarta, 12/1/2017**